

**PROSES DAN IMPLEMENTASI PERENCANAAN
PENDIDIKAN
(DALAM RANGKA PELAKSANAAN MBSP DI SATUAN
PENDIDIKAN ISLAM X)**

Lukito Lebdo Pitono

SD IT Abubakar Asdiqi

lukitolebdosuwondo@gmail.com

Abstract

The activation of autonomy and decentralization has an effect to the system of educational institution management. At first, the management system has top down pattern, now it changes into bottom up pattern. Formulation of the vision, mission, and objectives of educational institution have to formulated proporsionally by stake holder of educational institution. Planning and implementation process as part of the management of education has an important role to achieve the vision, mission, and goals that have been formulate. Tha paper discusses the process of planning and implementation “MBSP” in Islamic Education Unit X. With qualitative methods, there in described three pilars in Islamic Education Unit X, the are “MS”, “PAKEM”, adn “PSM”. Stages of planning process is done sequence as the preparation procedure “RKS/M”. Implementation of comprehensive planning was done through various forums, cordination, sincronization, control, and evaluation.

Keywords: *Management, Process, Implementation, Planning.*

Abstrak

Diberlakukannya otonomi dan desentralisasi berdampak terhadap pola pengelolaan satuan pendidikan. Pengelolaan yang semula berpola top-down berubah menjadi bottom-up. Perumusan visi, misi, dan tujuan satuan pendidikan secara proporsional harus dirumuskan sendiri oleh stake holder satuan pendidikan. Proses dan implementasi perencanaan sebagai bagian dari pengelolaan pendidikan memiliki peran penting bagi tercapainya visi, misi, dan tujuan yang telah dirumuskan. Artikel ini membahas proses dan implementasi perencanaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan MBSP di satuan pendidikan Islam X. Dengan metode kualitatif, di dalamnya dideskripsikan tiga pilar MBS di satuan pendidikan Islam X, yakni MS, PAKEM, dan PSM. Tahapan proses perencanaan dilakukan secara urut sebagaimana prosedur penyusunan RKS. Implementasi perencanaan dilakukan secara komprehensif melalui berbagai forum koordinasi, sinkronisasi, dan kontrol, serta evaluasi.

Kata-kata Kunci: *Pengelolaan, Proses, Implementasi, Perencanaan*

Pendahuluan

Pada era reformasi, telah lahir UU No. 22 Tahun 2009 tentang Otonomi Daerah dan UU No. 25 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Kedua UU tersebut membawa konsekuensi terhadap bidang-bidang kewenangan daerah sehingga lebih otonom, termasuk dalam bidang pendidikan. Otonomi daerah sebagai kebijakan politik di tingkat makro akan memberikan imbas terhadap otonomi satuan pendidikan sebagai subsistem pendidikan nasional.

Perencanaan pendidikan merupakan salah satu kebijakan nasional yang terindependensi dengan kebijakan publik lainnya (Saud

dan Abin, 2009: 35). Di tingkat satuan pendidikan perencanaan pendidikan secara legal formal biasa disebut sebagai rencana kerja sekolah/madrasah (RKS/M). RKS/M dirumuskan berdasarkan peraturan-perundangan yang berlaku, yaitu: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dan Permendiknas No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.

Detail dari Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, Bab VIII tentang Standar Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan, Pasal 53, ayat (1) menyatakan bahwa setiap satuan pendidikan harus dikelola atas dasar rencana kerja tahunan yang merupakan penjabaran rinci dari rencana kerja jangka menengah satuan pendidikan yang meliputi 4 (empat) tahunan.

Lebih jauh lagi, dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dinyatakan bahwa satuan pendidikan wajib membuat: (1) Rencana Kerja Jangka Menengah (RKJM) yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai dalam kurun waktu 4 tahun yang berkaitan dengan mutu lulusan yang ingin dicapai dan perbaikan komponen yang mendukung peningkatan mutu lulusan, program ini memiliki periode implementasi 4 tahun; (2) Rencana Kerja Tahunan (RKT) yang dinyatakan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M) dilaksanakan berdasarkan RKJM, dengan masa implementasi setahun.

Pelaksanaannya di lapangan dalam rangka mewujudkan desentralisasi di bidang pendidikan, salah satunya adalah dengan diberlakukannya manajemen berbasis satuan pendidikan (MBSP); tak terkecuali di satuan pendidikan Islam X (selanjutnya ditulis SPI X). Untuk itu, melalui artikel ini akan disampaikan tinjauan proses dan implementasi perencanaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan MBSP di SPI X.

1. MBSP

MBSP merupakan kebijakan pendidikan yang berpola *bottom-up planing policy*. BPPN dan Bank Dunia (1999) memberikan pengertian bahwa MBSP merupakan bentuk alternatif satuan pendidikan dalam program desentralisasi di bidang

pendidikan yang ditandai dengan adanya otonomi yang luas di tingkat satuan pendidikan, partisipasi masyarakat, dan dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional (Mulyasa, 2009: 11).

MBSP terlahir dengan beberapa nama yang berbeda, yaitu tata kelola berbasis satuan pendidikan (*school-based governance*), manajemen mandiri satuan pendidikan (*school self-manegement*), dan bahkan juga dikenal dengan *school site management* atau manajemen yang bermarkas di satuan pendidikan. Istilah-istilah tersebut memang mempunyai pengertian dengan penekanan yang sedikit berbeda. Namun, nama-nama tersebut memiliki roh yang sama, yakni satuan pendidikan diharapkan dapat menjadi lebih otonom dalam pelaksanaan manajemen satuan pendidikannya, khususnya dalam penggunaan 3M-nya, yakni *man, money, dan material*.

Roh MBSP sesungguhnya adalah pemberian otonomi kepada satuan pendidikan dalam pelaksanaan manajemen. Penyerahan otonomi dalam pengelolaan satuan pendidikan ini diberikan tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan. Oleh karena itu, Direktorat Pembinaan SMP menamakan MBSP sebagai Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS).

Di Indonesia dalam skala nasional penerapan MBSdimulai tahun 1999, sejak dilaksanakannya Undang-Undang nomor 22 dan 25 tentang Otonomi Daerah dan diikuti oleh penyempurnaan sistem pendidikan nasional, sedangkan implementasinya pada sekolah-sekolah dimulai pada tahun pelajaran 2003/2004.

a. Sejarah MBSP

Negara Inggris Raya, New Zealand, beberapa negara bagian di Australia, dan Amerika Serikat adalah negara yang pertama kali pada tahun 1970-an telah menerapkan kebijakan MBSP dalam agenda pembangunan pendidikannya. Pada tahun 1990-an, kebijakan MBSP kemudian diadopsi di negara-negara Asia, termasuk wilayah Hongkong, Sri Lanka, Korea, Nepal, dan dunia Arab. Daerah Eropah Timur, revolusi politik pada tahun 1990-an telah menimbulkan perubahan dalam kebijakan pendidikan, yang kemudian merambat ke daerah Afrika, kawasan Latin Amerika, dan negara-negara berkembang lainnya di seluruh dunia. Penerapan MBSP, baik

di negara maju, apalagi di negara yang sedang berkembang, mengalami pro dan kontra, dan bahkan dilema.

b. Empat Model MBSP

Leithwood dan Menzies (via Suparlan, 2007) menemukan empat model MBSP dari hasil penelitiannya, yaitu:

- 1) Kontrol administratif, kepala satuan pendidikan dominan sebagai representatif dari administrasi pendidikan.
- 2) Kontrol profesional, pendidik menerima otoritas.
- 3) Kontrol masyarakat, kelompok masyarakat dan orangtua peserta didik, melalui Komite Satuan pendidikan, terlibat dalam kegiatan satuan pendidikan.
- 4) Kontrol secara seimbang, orangtua siswa dan kelompok profesional (kepala satuan pendidikan dan pendidik) saling bekerja sama secara seimbang.

Keempat model MBSP tersebut sebenarnya merupakan berbagai varian yang muncul dalam proses pemberian otonomi. Pada awal pemberian otonomi, model yang pertama (kepala satuan pendidikan dominan) telah lahir dengan sosok sebagai raja-raja kecil yang berkuasa di berbagai satuan organisasi, termasuk kabupaten/kota sampai dengan satuan pendidikan satuan pendidikan. Model kedua, para guru telah dilibatkan dalam manajemen satuan pendidikan. Model ketiga, masyarakat dan orangtua siswa telah dilibatkan dalam kegiatan satuan pendidikan. Model keempat adalah model ideal yang diharapkan. Model keempat ini merupakan model hubungan sinergis antara keluarga, satuan pendidikan, dan masyarakat, yang diharapkan dapat mendongkrak upaya peningkatan mutu pendidikan.

2. SPI X

Satu dari sekian etika ilmiah adalah dengan menyamakan objek pembahasan. Dalam artikel ini yang dimaksud SPI X adalah salah satu satuan pendidikan (swasta) Islam yang penyelenggaraannya berupaya memadukan secara integratif nilai dan ajaran Islam dalam bangunan kurikulum dengan pendekatan pembelajaran yang efektif dan pelibatan yang optimal dan kooperatif antara guru dan orang tua, serta masyarakat untuk membina karakter dan kompetensi siswa.

Adapun karakteristik SPI X yang dimaksudkan dalam artikel ini adalah satuan pendidikan yang menjadikan Islam sebagai landasan filosofis; mengintegrasikan nilai Islam ke dalam

bangunan kurikulum; menerapkan dan mengembangkan metode pembelajaran untuk optimalisasi proses belajar mengajar; mengedepankan qudwah hasanah dalam mengembangkan karakter peserta didik; menumbuhkan biah solihah dalam iklim dan lingkungan satuan pendidikan (menumbuhkan kemaslahatan dan meniadakan kemaksiatan serta kemungkaran); melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam mendukung tercapainya tujuan pendidikan; mengutamakan nilai ukhuwwah dalam semua interaksi antarwarga satuan pendidikan, membangun budaya rawat, resik, rapih, runut, ringkas, sehat, dan asri; menjamin seluruh proses kegiatan satuan pendidikan untuk selalu berorientasi pada mutu; dan menumbuhkan budaya profesionalisme yang tinggi di kalangan tenaga pendidik dan kependidikan.

3. Proses dan [Implementasi Perencanaan Pendidikan \(dalam Rangka Pelaksanaan MBSP di SPI X\)](#)

Setiap diri mempunyai potensi. Setiap warga satuan pendidikan mempunyai kemampuan tertentu. Satuan pendidikan yang mampu mendorong warganya (guru, peserta didik, tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, pengurus yayasan, pengawas satuan pendidikan, tokoh masyarakat) berkontribusi untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan berarti telah melakukan proses demokrasi. Bila seseorang dilibatkan (berpartisipasi) untuk diberdayakan dalam pengambilan keputusan, dalam diri yang bersangkutan akan tumbuh rasa memiliki terhadap keputusan tersebut. Semakin besar tingkat partisipasi dari pemberdayaan yang kita lakukan, semakin besar pula rasa memiliki. Semakin besar rasa memiliki, semakin besar pula rasa tanggung jawabnya. Dan semakin besar rasa tanggung jawabnya, semakin besar pula dedikasinya.

SPI X mempunyai karakter yang antara lain menjadikan Islam sebagai landasan filosofis. Maka bagi SPI X, perencanaan bukanlah merupakan sesuatu yang asing mengingat adanya firman Allah dalam QS Ath Thariq (86: 16):

Yang artinya, *“Dan Akupun membuat rencana (pula) dengan sebenar-benarnya”*.

Proses dan implementasi perencanaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan MBSP tentulah harus mengacu pada tiga (3) pilar MBSP yakni: (1) manajemen sekolah/madrasah (MS/M); (2)

pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan (PAKEM); dan peran serta masyarakat (PSM). Alurnya di tingkat satuan pendidikan yang dalam hal ini mengacu pada rencana kerja sekolah/madrasah (RKS/M) akan diuraikan secara singkat dengan penekanan pada identifikasi tantangan dan perumusan program.



a. Persiapan

Sebelum penyusunan RKS/M dilakukan, Dewan Pendidik (kepala satuan pendidikan dan guru) bersama komite satuan pendidikan dan yayasan membentuk tim penyusun RKS/M yang disebut kelompok kerja rencana kerja sekolah/madrasah (KKRKS/M). Tugas utama KKRKS/M adalah menyusun RKS/M. Pembentukan KKRKS/M hendaknya dilakukan melalui proses demokratis dengan mengedepankan musyawarah mufakat.

Setelah KKRKS/M terbentuk, KKRKS/M mengikuti pembekalan/orientasi mengenai kebijakan-kebijakan pengembangan pendidikan dan penyusunan RKS/M. Kegiatan utama selama tahap pembekalan ini adalah membantu KKRKS/M untuk mengenal informasi pokok yang diperlukan dalam perencanaan pendidikan. Subjek yang dibahas adalah: peraturan dan perundang-undangan mengenai pendidikan dan perlindungan anak, kebijakan pendanaan pendidikan, kebijakan peningkatan mutu dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan, prioritas pendidikan tingkat kabupaten/kota, manajemen berbasis sekolah/madrasah (MBS/M), pendekatan, strategi dan metode pembelajaran inovatif seperti pembelajaran aktif, pembelajaran aktif kreatif efektif dan menyenangkan (PAKEM), peranserta masyarakat dalam pendidikan, perencanaan pendidikan di satuan pendidikan, penyusunan RKS/M; dan peran dan fungsi masing-masing pemangku kepentingan dalam proses perencanaan. Kegiatan pembekalan ini bisa dalam bentuk

kunjungan ke satuan pendidikan referensi, pelatihan, atau pemberian informasi.

b. Penyusunan RKS/M

Penyusunan RKS/M terdiri dari 5 (lima) tahap, yaitu:

1) Tahap I: Identifikasi Tantangan

Tahap ini terdiri dari 4 langkah, yakni:

- a) Menyusun profil satuan pendidikan; di dalamnya berisi gambaran yang jelas, lengkap, dan objektif tentang situasi satuan pendidikan saat ini serta perbandingannya dengan tahun-tahun sebelumnya. Sesuai dengan Permendiknas No. 19 tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan bahwa RKS/M memuat 8 (delapan) komponen/kategori, oleh sebab itu, profil satuan pendidikan juga memuat 8 (delapan) komponen/kategori, (1) Kesiswaan, (2) Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran, (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangannya, (4) Sarana dan Prasarana, (5) Keuangan dan Pembiayaan, (6) Budaya dan Lingkungan Satuan pendidikan, (7) Peranserta Masyarakat dan Kemitraan, (8) Lain - lain yang mengarah kepada peningkatan dan pengembangan mutu.
- b) Mengidentifikasi harapan pemangku kepentingan. Pertanyaan kunci yang harus dijawab dalam perumusan harapan pemangku kepentingan adalah: *Seperti apa seharusnya satuan pendidikan ini empat tahun mendatang?* Harapan pemangku kepentingan disusun dengan rambu-rambu: (1) Dirumuskan berdasarkan profil (keadaan satuan pendidikan/madrasah) saat ini, hal mana yang akan ditingkatkan, diperbaiki atau dicapai dalam 4 (empat) tahun ke depan. (2) Berorientasi pada peningkatan/perbaikan satuan pendidikan (*school improvement*), termasuk memperkuat kapasitas satuan pendidikan/madrasah dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan menyampaikan pengetahuan tersebut kepada peserta didik, serta memperkuat kapasitas satuan pendidikan dalam kolaborasi yang dibangun atas dasar kepercayaan (3) Mencakup bukan hanya harapan

- penyedia layanan (*service provider*), tetapi juga pengguna layanan (*service user*). (4) Mengacu pada visi dan misi serta tujuan yang sudah dimiliki oleh satuan pendidikan. (5) Mengacu kepada 8 (delapan) standar nasional pendidikan (lihat PP No. 19 tahun 2005).
- c) Merumuskan tantangan satuan pendidikan yakni perbedaan antara apa yang menjadi harapan pemangku kepentingan dengan apa yang ada pada profil. Tantangan satuan pendidikan sebaiknya dirumuskan secara spesifik, artinya Rumusan Tantangan harus menunjukkan: (1) Apabila berkaitan dengan nilai mata pelajaran, maka perlu dirumuskan besaran tantangan, dan di kelas mana saja, apakah angka merupakan angka rata-rata atau angka absolut, kalau angka rata-rata, maka rata-rata yang mana (*mean, median* dan seterusnya); (2) Apabila berkaitan dengan guru, maka perlu dirumuskan guru di kelas mana saja; apakah guru semua kelompok umur atau kelompok umur tertentu, apakah semua mata pelajaran atau satu mata pelajaran saja, dan seterusnya; (3) Apabila berkaitan dengan buku/bahan ajar, maka perlu dirumuskan mata pelajaran mana saja atau semua mata pelajaran, buku teks, buku referensi; buku pegangan peserta didik atau guru, untuk kelas mana saja dan seterusnya.
- d) Menetapkan tantangan utama (prioritas). Banyak tantangan yang harus diwujudkan oleh satuan pendidikan/madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan. Namun karena keterbatasan-keterbatasan satuan pendidikan seperti keterbatasan dalam sumberdaya manusia, pendanaan, fasilitas dan sebagainya; maka satuan pendidikan/madrasah sebaiknya memfokuskan diri pada beberapa tantangan yang memiliki pengaruh besar pada kinerja satuan pendidikan secara keseluruhan. Tantangan inilah yang disebut Tantangan Utama (Prioritas). Tantangan Utama dipilih dari urutan prioritas tantangan tertinggi dan diperkirakan masih dapat ditangani sampai akhir periode RKS/M. Penetapan tantangan utama ini juga tergantung kepada kebijakan satuan pendidikan. Satuan pendidikanlah yang menentukan sampai urutan ke berapa tantangan tersebut dianggap sebagai tantangan

utama atau prioritas. Hal-hal di bawah ini dapat digunakan sebagai pedoman untuk menentukan tantangan utama: (1) Tingkat kepentingan suatu tantangan terhadap keseluruhan tujuan pengembangan/peningkatan mutu; (2) Besaran tantangan (besarnya perbedaan antara harapan dengan kondisi nyata satuan pendidikan); (3) Sumberdaya manusia yang tersedia untuk menangani tantangan tersebut, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang; (4) Jumlah biaya yang diperkirakan dan perkiraan jumlah dana yang akan diperoleh; serta (4) Kesiapan satuan pendidikan dalam menghadapi tantangan tersebut, dsb.

2) Tahap II: Analisis Pemecahan Tantangan

Tahap ini terdiri dari 2 (dua) langkah, yakni:

a) Menentukan penyebab utama tantangan, caranya adalah: (1) Membuat daftar penyebab tantangan; (2) Memilih penyebab utama tantangan.

b) Menentukan alternatif pemecahan tantangan utama: (1) Membuat daftar alternatif pemecahan tantangan; (2) Menetapkan alternatif pemecahan tantangan utama.

3) Tahap III: Perumusan Program

Tahap ini terdiri dari 4 (empat) langkah, yakni:

a) Menentukan sasaran. Sasaran adalah tantangan utama yang akan dicapai satuan pendidikan/madrasah dalam waktu 4 (empat) tahun ke depan. Penetapan sasaran satuan pendidikan/madrasah ini bertujuan untuk dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan yang akan dilakukan dalam waktu tertentu guna merealisasikan alternatif pemecahan tantangan yang telah dirumuskan. Penentuan sasaran yang baik, harus memperhatikan 3 (tiga) hal, yaitu: realistis, dapat diukur, dan spesifik.

b) Merumuskan program dan menetapkan penanggung jawab program. Program adalah upaya untuk mencapai sasaran. Penamaan program sebaiknya disesuaikan dengan Sasaran. Program ini bisa dilaksanakan oleh pihak satuan pendidikan/madrasah maupun pihak lain, misalnya dengan melibatkan komite satuan

pendidikan/madrasah atau warga masyarakat yang lebih luas. Program sebaiknya dikelompokkan sesuai dengan kategori yang terdapat pada Permendiknas Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan, yakni: Kesiswaan, Kurikulum dan Kegiatan Pembelajaran, Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Pengembangannya, Sarana dan Prasarana, Keuangan dan Pembiayaan, Budaya dan Lingkungan Satuan pendidikan, Peranserta Masyarakat dan Kemitraan, dan Rencana kerja lain yang mengarah pada peningkatan dan pengembangan mutu. Setelah program dirumuskan, maka perlu ditentukan siapa penanggung jawab program. Penanggung jawab program bisa berupa suatu unit kerja, misalnya komite satuan pendidikan; atau bisa juga perorangan, misalnya guru kelas 6.

- c) Merumuskan indikator keberhasilan program dan kegiatan. Indikator keberhasilan adalah ukuran yang digunakan untuk menilai berhasil atau tidaknya suatu program yang telah dilakukan. Apabila indikator keberhasilan telah dapat dicapai, maka program dapat dikatakan berhasil; sebaliknya apabila indikator keberhasilan belum dapat dicapai, maka program dapat dikatakan belum berhasil. Indikator harus ditentukan agar program yang ditetapkan dapat diukur keberhasilannya. Indikator keberhasilan setiap program bisa berkaitan dengan proses dan dapat juga berkaitan langsung dengan hasil akhir. Indikator program yang berkaitan dengan capaian akhir dapat mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang telah disusun oleh KKRKS/M. Indikator keberhasilan dapat bersifat kuantitatif atau kualitatif, yang penting dapat diukur dan dirumuskan secara spesifik, operasional, dan dalam bentuk kalimat pernyataan. Kegiatan adalah tindakan-tindakan yang akan dilakukan di dalam program. Kegiatan perlu dirumuskan dari setiap program dengan mengacu pada indikator keberhasilan yang telah ditetapkan sehingga program dapat dicapai. Kegiatan bisa diambil dari alternatif pemecahan yang telah ditetapkan sebelumnya. Perumusan kegiatan dilakukan dengan cara membuat daftar kegiatan yang terkait dengan program tersebut. Kegiatan yang baik adalah

yang mengarah pada pencapaian indikator keberhasilan yang telah dirumuskan dan dapat diperkirakan biaya atau anggarannya.

- d) Menentukan kegiatan dan jadwal kegiatan. Jadwal adalah alokasi waktu suatu program dan kegiatan tertentu yang akan dilaksanakan. Tujuan penyusunan jadwal program dan kegiatan ini adalah untuk mempermudah pelaksana dalam menentukan urutan kegiatan dan mengatur penggunaan sumberdaya dan dana yang dimiliki satuan pendidikan. Dengan demikian alur kegiatan dan keuangan satuan pendidikan/madrasah dapat dikontrol dengan lebih efektif.
- 4) Tahap IV: Perumusan Rencana Anggaran Sekolah/Madrasah
Tahap ini terdiri dari 3 (tiga) langkah:
 - a) Membuat rencana biaya program
 - b) Membuat rencana pendanaan program
 - c) Menyesuaikan rencana biaya dengan sumber pendanaan.
 - 5) Tahap V: Perumusan Rencana Kerja Tahunan Satuan pendidikan/Madrasah (RKTS/M) dan Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah/Madrasah (RKAS/M).
Tahap ini terdiri dari 2 (dua) langkah:
 - a) Merumuskan Rencana Kerja Tahunan: (1) Menetapkan program/kegiatan strategis; (2) Menetapkan kegiatan operasi; (3) Menetapkan jadwal RKTS/M;
 - b) Membuat RKAS/M.
- c. Penyetujuan, Pengesahan, dan Sosialisasi RKS/M
Terdiri dari 3 (tiga) langkah, yakni:
 - 1) Penyetujuan RKS/M oleh rapat dewan pendidik setelah memperhatikan pertimbangan komite satuan pendidikan/madrasah;
 - 2) Pengesahan RKS/M oleh Dinas Pendidikan (untuk satuan pendidikan negeri) atau oleh penyelenggara satuan pendidikan (bagi satuan pendidikan swasta);
 - 3) Sosialisasi kepada pemangku kepentingan satuan pendidikan/madrasah.
 - d. Implementasi

Pola pelaksanaan atau penerapan rencana yang telah disusun dilakukan secara komprehensif. Koordinasi, sinkronisasi, dan kontrol, serta evaluasi implementasi rencana dilakukan melalui berbagai forum mulai dari *meeting* Rabu, koordinasi panitia, dan koordinasi umum. Agenda yang dibahas pada *meeting* Rabu oleh para pemimpin berupa pengarahan yang bersifat global atas sebuah rencana. Dari pengarahan tersebut ditindaklanjuti dengan koordinasi oleh panitia kegiatan yang berfungsi semisal komisi. Di dalamnya dibahas teknis dan operasional secara detail suatu rencana kegiatan. Hasil rapat dari panitia kegiatan kemudian dibawa ke dalam rapat koordinasi umum atau diplenokan.

Pola pelaksanaan atau penerapan RKS/M yang dilakukan secara berjenjang didasarkan prosedur operasional standar (POS). Di SPI X, POS yang dimaksudkan lebih dikenal dengan istilah panduan. Adapun panduan yang ada di SPI X terdiri atas:

- 1) Panduan pengelolaan satuan pendidikan
- 2) Panduan administrasi surat menyurat
- 3) Panduan administrasi keuangan
- 4) Panduan kepegawaian
- 5) Panduan pengembangan kurikulum
- 6) Panduan proses pembelajaran
- 7) Panduan penilaian
- 8) Panduan kesiswaan
- 9) Panduan pengelolaan sarana dan prasarana
- 10) Panduan kehumasan

Dari deskripsi tersebut, berikut ini penulis kemukakan proses dan implementasi perencanaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan MBSP di SPI X. Tentu saja dalam praktiknya, tahapan/alur penyusunan proses dan implementasinya tidak serapi yang diuraikan di atas.

e. MS yang Memberdayakan Koordinator

MS merupakan proses, dalam arti serangkaian kegiatan yang diupayakan kepala satuan pendidikan bagi kepentingan satuan pendidikannya. Rangkaian kegiatan diupayakan oleh kepala satuan pendidikan bersama guru dan tenaga kependidikan dalam mendayagunakan semua fasilitas yang ada. Berdasarkan identifikasi masalah, manajemen satuan pendidikan dapat dikatakan relatif belum berjalan, struktur

organisasi belum terbentuk, deskripsi tugas belum jelas, dan karenanya kompetensi kepala satuan pendidikan, guru, dan tenaga kependidikan dipandang perlu ditingkatkan melalui berbagai diklat maupun pertemuan ilmiah yang relevan.

Dalam upaya memperkuat peran kepala satuan pendidikan untuk memberdayakan komponen yang ada, kompetensi kepala satuan pendidikan/madrasah dalam hal pengelolaan satuan pendidikan selalu ditingkatkan melalui berbagai diklat maupun pertemuan ilmiah, baik yang diselenggarakan oleh UPT Disdik Kecamatan, Dinas Pendidikan Kabupaten, maupun kerjasama dengan LPMP bahkan dengan Kementerian Pendidikan. Kegiatan peningkatan kompetensi yang pernah diikuti kepala satuan pendidikan antara lain *Workshop* dan Pelatihan KSP Islam Se-Indonesia di Surabaya (2007), Pelatihan Calon *Assesor* PKG di tingkat kecamatan (2011), dan *International Seminar on National Congress III ...* di Palembang (2013).

Di sisi lain, para guru dan tenaga kependidikan juga mendapatkan berbagai pendidikan dan pelatihan. Para guru mengikuti berbagai pelatihan dan forum ilmiah, baik yang berupa pelatihan yang bertujuan membangkitkan motivasi maupun yang berupa bimbingan teknis. Pelatihan dan forum ilmiah yang diikuti para guru di antaranya adalah *Inspiring Teacher Training*, Pelatihan Profesionalisme Guru dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Pembelajaran ..., Pelatihan Cara Cepat Membaca Al Quran dengan Metode *Al Barqyö*, Seminar Pemahaman dalam Penanganan ABK, Pelatihan *Classroom Management*, Lokakarya Nasional Pendidikan Karakter *“Tekad Bersama Membangun Bangsa melalui Pendidikan Bermutu ...”*, dan Seminar Nasional Pendidikan Karakter *“Implementasi Pendidikan Karakter di ...”*.

Pemberdayaan setiap warga satuan pendidikan tersebut merupakan prasyarat atas pendelegasian amanah yang akan diemban oleh seluruh warga satuan pendidikan. Hal mana, dalam sudut pandang manajemen, pendelegasian merupakan suatu keniscayaan dalam mencapai tujuan sebuah organisasi (Straub, 2006). Dalam hal itu, secara proporsional dan kontekstual juga relevan dengan firman Allah berikut ini:

“Pada malam itu turun malaikat-malaikat dan Malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur segala urusan” (Al Qadr [97]: 4)

Pun demikian halnya dalam hadits Rasul. Urusan pendelegasian juga merupakan hal yang pernah dilakukan oleh Rasul kepada sahabatnya. Hal itu setidaknya dapat dilihat dari Kitab Ahmad hadits nomor 12737:

Yang artinya: “Telah menceritakan kepada kami Abdush-Shamad dan 'Affan berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad secara makna dari Simak dari Anas bin Malik, Nabi Shallallahu'alaihi wasallam pernah mendelegasikan Abu Bakar Shiddiq radliyallahu'an untuk menyampaikan surat. Tatkala ia sampai di Dzul Hulaifah, 'Affan berkata, “Jangan seorangpun menyampaikannya kecuali aku dan salah seorang keluargaku, maka (Rasulullah Shallallahu'alaihi wasallam) mendelegasikan 'Ali untuk menyampaikan surat tersebut.”

Masalah MS mulai terpecahkan, struktur organisasi terbentuk, job deskripsi terurai, dan kompetensi meningkat. Dalam menerapkan MS, kepala satuan pendidikan, selaku pemimpin satuan pendidikan berupaya memberdayakan guru dan tenaga kependidikan sebagai koordinator yang mememanajementi 8 (delapan) standar nasional pendidikan berdasarkan struktur organisasi dan deskripsi tugas yang telah disusun sebagai wujud dari pendelegasian amanah. Manajemen standar isi dan standar pengelolaan dikelola oleh wakil kepala satuan pendidikan. Manajemen standar proses dan standar penilaian dikelola oleh koordinator kurikulum. Manajemen standar kompetensi lulusan dikelola oleh koordinator kesiswaan. Manajemen standar pendidik dan tenaga kependidikan dikelola oleh koordinator kepegawaian dengan dibantu dari pihak yayasan. Manajemen standar sarana dan prasarana dikelola oleh koordinator sarpras dengan dibantu oleh sarpras yayasan. Manajemen pembiayaan dikelola oleh bendahara yang berkoordinasi dengan bendahara yayasan.

Koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi antarkoordinator manajemen standar dilakukan secara berkala dan berkesinambungan selama sepekan dua kali. Dalam lain

kesempatan, secara temporer, koordinator mengawal pelaksanaan program sesuai jadwal kegiatan bersama kelompok-kelompok kerja atau panitia kegiatan yang dibentuk. Kelompok kerja atau kepanitiaan yang dibentuk bisa jadi memartisipasikan pihak orang tua/wali murid yang tergabung dalam paguyuban kelas. Bentuk partisipasi itu bisa berupa kontribusi tenaga, pikiran, bahkan materi dengan berbagai variasi yang sesuai kebutuhan.

Merupakan hal yang melegakan, pada tahun pelajaran 2007/2008, dengan menginduk di SPN X, para siswa kelas VI untuk yang pertama kalinya telah menempuh UASBN dengan hasil yang memuaskan. Dan pada tahun pelajaran berikutnya, SPI X mengikuti akreditasi untuk yang pertama kalinya juga dan mendapatkan nilai 92,04 sehingga masuk dalam klasifikasi A (Amat Baik).

f. Pemberdayaan KKG Internal sebagai Wahana untuk Mengimplementasikan PAKEM

Pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan pada dasarnya merupakan proses pemberdayaan guru dan siswa. Guru aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dalam memberikan pembelajaran. Peserta didik aktif, kreatif, efektif, dan senang dalam mengikuti kegiatan pembelajaran sehingga terdorong untuk belajar terus sepanjang hayat dan mandiri.

KKG internal merupakan wadah atau forum profesional guru di satuan pendidikan. Perannya sangat penting dan strategis untuk meningkatkan kompetensi guru sehingga guru lebih profesional. Melalui pemberdayaan KKG internal permasalahan pembelajaran yang dihadapi guru di kelas dapat terpecahkan sehingga proses pembelajaran lebih efektif, dan bermutu.

KKG internal merupakan pilihan yang dilaksanakan di SPI X, mengingat kekhasan dinamika yang terjadi tidak sama dengan yang terjadi di satuan pendidikan reguler. Akan halnya dalam pelaksanaannya, KKG internal guru kelas dikoordinatori oleh koordinator kelas. Sedangkan atas KKG internal mapel PAI Terpadu (PAI, Al Quran, dan Bahasa Arab), Bahasa Inggris, dan PJOK, dikoordinatori oleh koordinator mapel tersebut. Secara keseluruhan, koordinator yang ada terdiri atas koordinator kelas bawah (I-III); kelas atas (IV-VI); mapel PAI Terpadu (PAI, Al Quran, dan Bahasa Arab

kelas I-VI); mapel Bahasa Inggris (kelas I-VI); dan PJOK (kelas I-VI). Selain itu, juga ditetapkan beberapa nara sumber mapel berdasarkan latar belakang pendidikan formal yang dimiliki oleh para guru, yakni mapel Matematika, Bhs Indonesia, IPA, IPS, Bhs Inggris, Bhs Arab, dan Bhs Jawa.

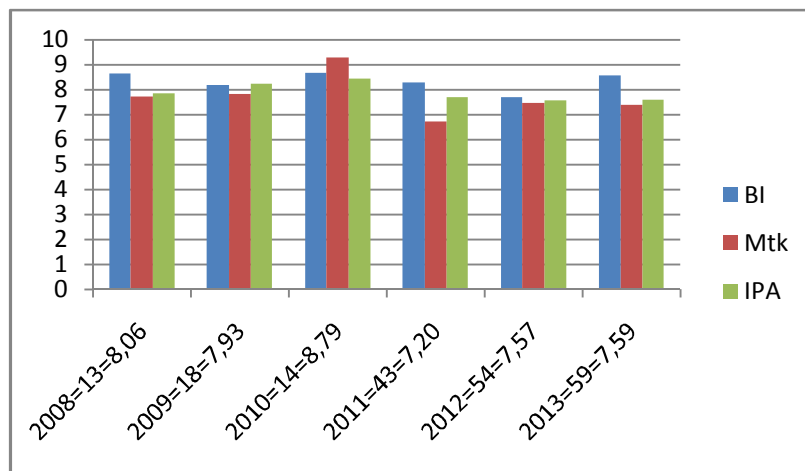
Tugas para koordinator, selain merancang dan mengembangkan KKG internal juga berperan menjadi mediator dan komunikator atas pelaksanaan KKG yang diselenggarakan di tingkat gugus maupun kecamatan bahkan pada tingkatan yang lebih tinggi lagi. Secara rutin dan berkala, guru-guru SPI X juga mengikuti KKG tersebut, sebab pada prinsipnya semua program pendidikan yang diselenggarakan di SPI X merupakan bagian yang tak terpisahkan dari program pendidikan nasional.

Pemberdayaan KKG internal di SPI X dilakukan dalam dua tahap, yaitu : (1) perencanaan; dan (2) pengembangan. Dalam tahap perencanaan, mereka mengumpulkan guru, memilih pengurus, merancang kegiatan dan program kerja, mencari informasi dari berbagai sumber dan mengembangkannya, mendata/mencari dukungan dana dengan mengajukan proposal, merencanakan program monitoring/evaluasi kerja, dan pelaporan kegiatan. Dalam tahap pengembangan mereka merancang kegiatan yang terdiri atas kegiatan mereformulasi pembelajaran melalui model-model pembelajaran yang variatif seperti mempersiapkan RPP dan mendiskusikan strategi alternatif pembelajaran yang efektif sesuai dengan standar proses, merancang pengembangan silabus sesuai dengan standar isi dan standar kelulusan, merancang pengembangan penilaian sesuai dengan standar penilaian, merancang lembaran kegiatan ilmiah/praktik siswa untuk tiap KD, mendiskusikan penggunaan media pembelajaran yang tepat; mendiskusikan kesulitan kesulitan yang dihadapi dalam KBM di kelas; menampung karya PTK guru, dan menyediakan jadwal presentasi; sosialisasi pembaruan yang didapat oleh guru yang mengikuti penataran tingkat provinsi/nasional, baik yang diselenggarakan oleh Dinas maupun di luar dinas; memperluas wawasan guru dengan mendatangkan pakar/nara sumber, guru model dan studi banding; melaksanakan program pemberdayaan dalam berbagai kegiatan, antara lain: seminar, workshop, lokakarya, diskusi panel.

Beberapa kegiatan pemberdayaan KKG internal yang pernah diselenggarakan dalam bentuk kerja sama dengan pihak luar antara lain berupa *Inspiring Teacher Training* dengan Trustco, *Full Day Workshop NLP for Teaching Revolutions* dengan *Theta Mind Explorer*, dan Pelatihan Standar Proses Pola 30 Jam dengan Disdik Kab. Pati.

Sebagai sebuah proses penilaian, UASBN/UN dapat memberikan pemetaan kualitas satuan pendidikan. Secara objektif, dengan melihat hasil nyata UASBN/UN, mereka senantiasa membenahi kekurangan khususnya melalui KKG internal. Usaha yang mereka lakukan mendapatkan imbalan berupa hasil ujian yang dari tahun ke tahun mengalami perubahan yang dinamis.

Grafik 1
Nilai Hasil Ujian dari Tahun ke Tahun



Prestasi siswa dalam bidang akademik yang dilihat dari prestasi yang diraih siswa dalam mengikuti lomba-lomba di bidang studi dari tahun ke tahun juga mengalami dinamika. Dalam dua tahun terakhir mereka mempersembahkan prestasi dari cabang lomba Olimpiade Matematika, Dokter Kecil, Bahasa Indonesia, Tartil Al Quran, Khithobah, LCC PAI, dan Tahfidz baik di tingkat kecamatan maupun kabupaten. Prestasi satuan pendidikan dalam bidang olahraga juga cukup lumayan. Melalui cabang lomba Taekwondo, Karate, Pencak Silat, Tenis Meja, dan Tenis Lapangan, para siswa mempersembahkan prestasi mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten, bahkan provinsi. Dan yang juga tidak ketinggalan adalah prestasi

satuan pendidikan di bidang kesenian. Para siswa memersempahkan prestasi dari cabang lomba Kerajinan Tangan, Seni Tarian Daerah, Membatik, Menggambar, dan Melukis mulai dari tingkat kecamatan sampai tingkat kabupaten.

g. Pemberdayaan PSM

Partisipasi masyarakat dalam meningkatkan mutu pendidikan di SPI X terwujud dalam bentuk yayasan, komite satuan pendidikan, dan paguyuban kelas. Peningkatan peran serta masyarakat terhadap manajemen satuan pendidikan pada dasarnya merupakan upaya pemberdayaan masyarakat sebagai konsekuensi dari diberlakukannya otonomi atau desentralisasi pendidikan. Di tingkat satuan pendidikan, berbagai program dikoordinasikan dengan komite. Sedangkan di tingkat kelas, rancangan dan pelaksanaan program dikoordinasikan dalam forum paguyuban kelas. Dalam forum itu, wali kelas dan mitra wali kelas bekerja sama dengan para orang tua/wali murid. Secara relatif dapat dikatakan kalau ruang lingkup yayasan dan komite lebih bersifat umum dalam hubungannya dengan urusan satuan pendidikan secara makro. Sedangkan ruang lingkup paguyuban bersifat khusus dalam hubungannya dengan urusan kelas.

PSM terhadap proses pendidikan di SPI X yang berasal dari orang tua/wali murid baik yang melalui jalur komite maupun langsung pada umumnya berupa pembiayaan satuan pendidikan selain BOS, yaitu biaya personal dan investasi. Meskipun demikian ada pula yang berupa materi seperti ATK, alat peraga dan media pembelajaran, alat makan, alat dan bahan olahraga, bahan-bahan bangunan, bahkan berupa generator. Selain itu ada pula bantuan tenaga. Orang tua/wali murid ada berkenan menyumbangkan waktu, tenaga, dan pikirannya sebagai *visitor teacher*. Sementara itu melalui berbagai usaha yang dilakukan oleh yayasan, SPI X berkali-kali mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan daerah baik yang berupa gedung maupun buku: bantuan rehab ruang kelas dan peralatan perpustakaan, bantuan sosial *hardware* dan *software* multimedia kreatif.

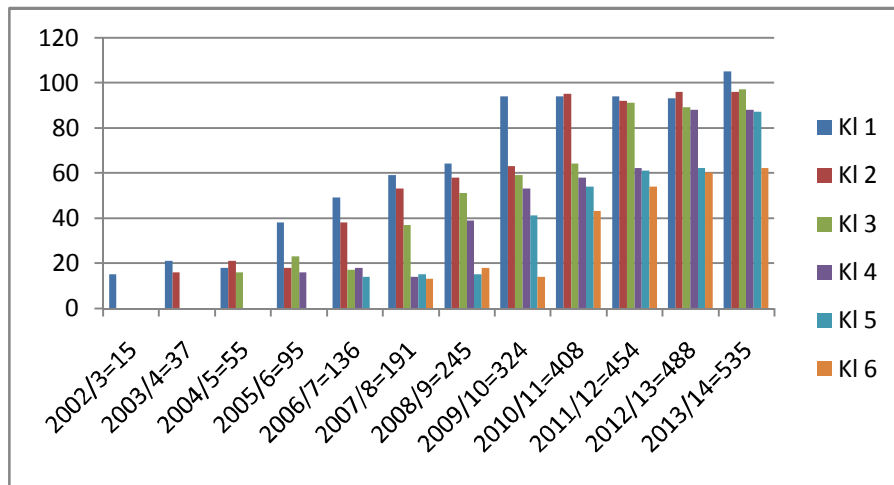
Optimalisasi PSM juga dilakukan dengan berbagai instansi yang relevan. Berikut ini menampilkan tabel kerja sama yang dimaksudkan:

Tabel
Program Kerja Sama

No	Nama Program Kerja Sama	Instansi Mitra	Thn	Lama Kerja Sama	Hasil yang Dicapai
1.	Psikotest	Persona Utama	2008	1 Tahun	Terpetakannya tingkat kecerdasan peserta didik
2.	<i>Out Class</i>	Primagama English	2011	Setiap 2 tahun diperbarui	Meningkatnya keterampilan berbahasa Inggris
3.	Pemberdayaan Potensi Anak	RS Keluarga Sehat	2012	Setiap 1 tahun diperbarui	Berkembangnya potensi anak sesuai minat dan bakat
4.	Perjanjian Kerja Sama Bimbingan Belajar	Ganesha Operation	2012	Setiap 1 tahun diperbarui	Terbimbingnya anak dalam belajar sesuai dengan modalitasnya
5.	Perjanjian Kerja Sama Bimbingan Belajar	LP3I	2012	Setiap 1 tahun diperbarui	Terbimbingnya anak dalam menghadapi UN
6.	Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Keuangan	BMT HARUM	2012	Setiap 1 tahun diperbarui	Terkelolanya keuangan peserta didik
7.	Perjanjian Kerja Sama Wisata	Naura Tourø and Travel	2011	Setiap 1 tahun diperbarui	Terselenggara-nya kegiatan wisata siswa

Upaya pemberdayaan atas semua komponen yang ada dengan berbagai dinamikanya dilakukan terus-menerus. Dan secara kuantitatif, jumlah peserta didik dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan yang pada gilirannya harus ditindaklanjuti secara tepat sehingga upaya untuk mencapai pendidikan yang berkualitas benar-benar dapat terwujud.

Grafik 2
Pertambahan Jumlah Peserta Didik dari Tahun ke Tahun



Kesimpulan

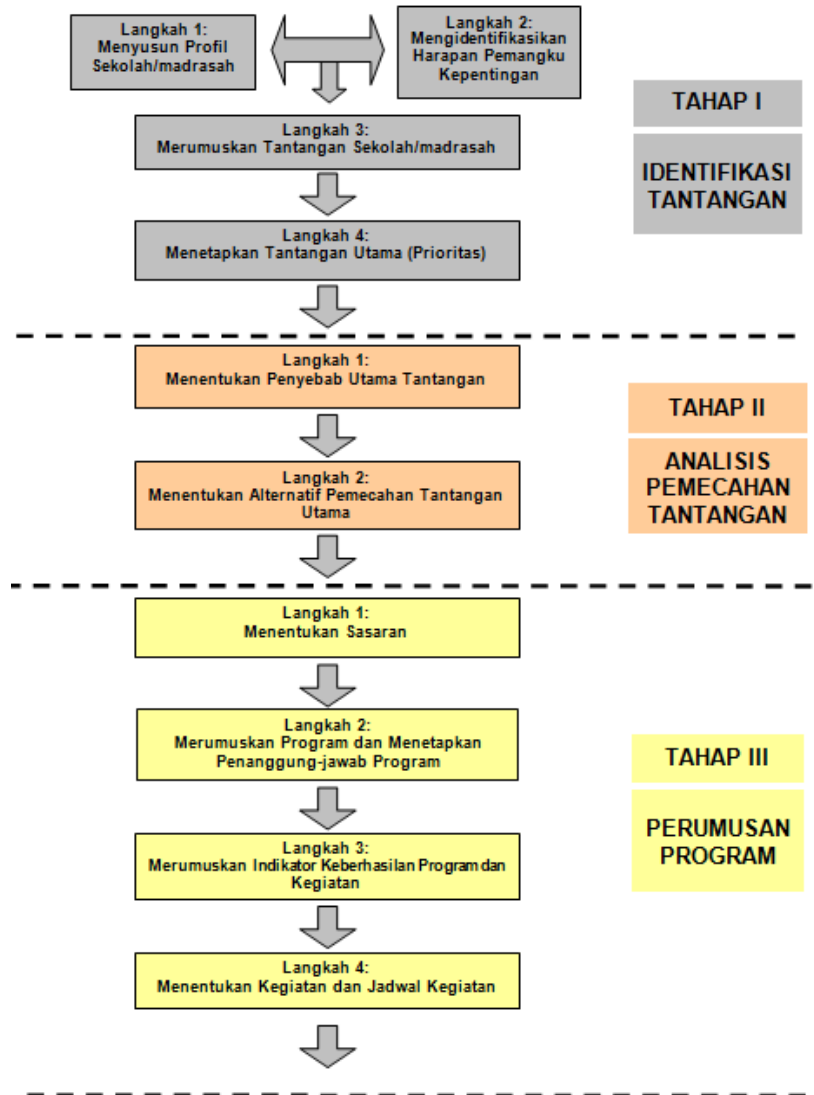
Proses dan implementasi perencanaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan MBSP, sebagai salah satu upaya untuk mengelola SPI X belum sepenuhnya dilaksanakan secara tertib. Semua pihak, mulai dari kepala satuan pendidikan, guru, tenaga kependidikan, pengurus yayasan, komite, dan orang tua/wali murid perlu terus-menerus meningkatkan kompetensi dalam perencanaan pendidikan.

Proses dan implementasi perencanaan pendidikan dalam rangka pelaksanaan MBSP di SPI X ke dalam tiga pilar MBSP terbukti cenderung mampu memberikan dampak positif terhadap proses dan hasil pendidikan.

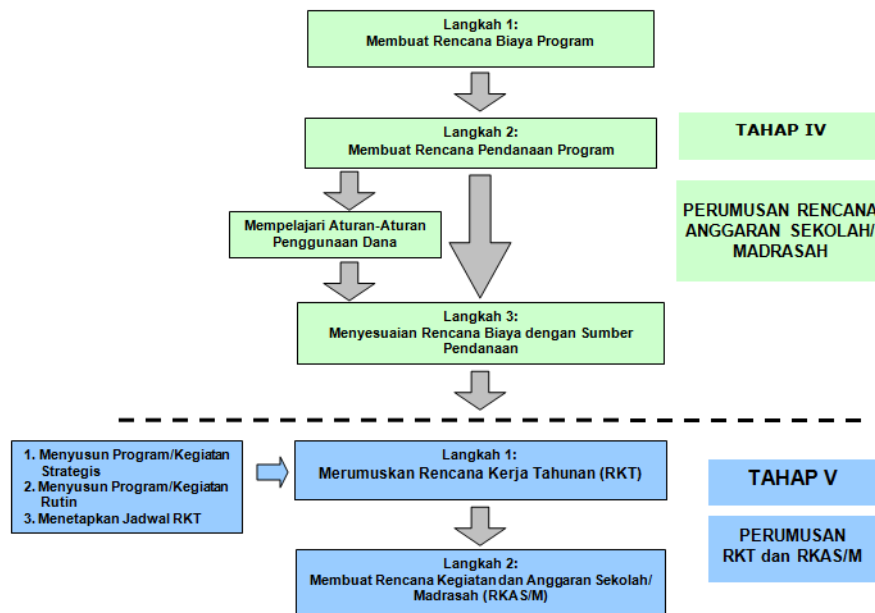
Untuk mencapai hal yang positif dalam proses dan implementasi perencanaan pendidikan, satuan pendidikan tidak punya pilihan selain *berpikir sebelum bertindak*. Mereka harus melakukannya dengan tertib, urutan, dan teliti.

Untuk menjaga berlangsungnya proses dan implementasi perencanaan pendidikan dalam lingkup internal maupun eksternal satuan pendidikan, langkah yang pertama dan paling utama yang harus dilakukan adalah dengan cara membentuk *team work* yang kompak dengan beranggotakan guru-guru dan tenaga kependidikan yang berkompeten.

Tahap-Tahap Penyusunan Rks/M



Tahap-Tahap Penyusunan Rks/M



Daftar Pustaka

- Fatah, N. 1996. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hamalik, Oemar. 2006. *Manajemen Pengembangan Kurikulum*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia. 2011. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Arah Kebijakan Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia*. Jakarta: Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Indonesia.
- Mulyasa, E. 2002. *Manajemen Berbasis Satuan pendidikan; Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- _____. 2009. *Menjadi Kepala Satuan pendidikan Profesional, dalam Konteks Menyukkseskan MBSP dan KBK*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Pidarta, Made. 1990. *Perencanaan Pendidikan Partisipatori, dengan Pendekatan Sistem*. Jakarta: Rineka Cipta.

- Purwanto, M. Ngalim. 2009. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rohiat. 2010. *Manajemen Satuan pendidikan; Teori Dasar dan Praktik, Dilengkapi dengan Contoh Rencana Strategis dan Rencana Operasional*. Bandung: Refika Aditama.
- Sahertian, Piet. 2000. *Supervisi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- _____. 2000. *Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan dalam rangka Pengembangan Sumberdaya Manusia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Saud, Udin Syaefudin dan Makmun, Abin Syamsuddin. 2009. *Perencanaan Pendidikan, Suatu Pendekatan Komprehensif*. Bandung: PPS UPI dengan Remaja Rosdakarya.
- Straub, Joseph T. 2006. *Seri Manajemen; Mendelegasikan Pekerjaan Dialihbasakan Vivi dari Global Business Library; Delegating Work*. Oryza: Yogyakarta.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Suparlan. (2007). Beberapa Temuan Hasil Penelitian Tentang MBSP (Manajemen Berbasis Satuan pendidikan). www.suparlan.com. Diunduh 4 Oktober 2013.
- Suryadi. 2009. *Manajemen Mutu Berbasis Satuan pendidikan, Konsep dan Aplikasi*. Tanpa Nama Kota: Sarana Panca Karya Nusa.
- Usman Abu Bakar dan Surohim. 2005. *Fungsi Ganda Lembaga Pendidikan Islam (Respon Kreatif terhadap Undang-Undang Sisdiknas)*. Yogyakarta: Safira Insania Pres.